

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah telah melakukan berbagai macam kebijakan melalui sektor perdagangan, sektor pariwisata, pajak, dan usaha lainnya. Selain itu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan dari modernisasi adalah memperbaiki layanan kepada masyarakat dengan menciptakan Good Governance sehingga Wajib Pajak yang dilayani akan memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan.

Sistem pemungutan Pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment system*, dimana pada sistem ini menuntut Wajib Pajak untuk memiliki kesadaran atas kewajibannya yaitu melaporkan pajak yang terhutang. Untuk sistem *self assessment system* dalam penerapannya dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi dimana Wajib Pajak terkadang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya, dan juga diperlukan kejujuran dari Wajib Pajak itu sendiri. Terbukti dengan masih adanya Wajib Pajak yang terkena sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunannya serta pembayaran pajaknya. Selain

itu Wajib Pajak juga masih tidak bisa memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga disini timbul penyebab rasa tidak peduli Wajib Pajak terhadap pelaporan dan pembayaran pajaknya.

Kepatuhan perpajakan berarti patuh pada aturan perpajakan dan taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencatat atau membukukan transaksi usaha, dan semua aturan perpajakan lainnya (Rahayu, 2010;138).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak mempunyai ketersediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti menyampaikan SPT Tahunan nya dalam setiap masa dan tahun. Karena setiap Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan mempunyai kewajiban setiap tahun dalam melaporkan hasil kegiatan usahanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak bisa dinilai berdasarkan kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak belum maksimal. Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhinya dalam melaporkan SPT Tahunannya pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT ini menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan menggunakan e-Form di KPP Pratama Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ungkapan diatas penulis mengambil tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan menggunakan e-Form di KPP Pratama Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari apa yang sudah ditentukan atau dengan kata lain agar penelitian terfokus pada penelitian yang diteliti, penelitian dalam hal ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan elektronik formulir (*e-Form*) dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan terhadap pelaporan elektronik tahun pajak 2017-2019.
2. Penggunaan elektronik formulir (*e-Form*) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2017-2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan kontribusi pada pengelola perpajakan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Dapat memberikan gagasan pemikiran bagi KPP Pratama Tulungagung dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, referensi, pengetahuan dan wawasan kepada peneliti lainnya.

